



Badan Karantina Pertanian

KEMENTERIAN PERTANIAN RI

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGUNAANGGARAN BA.018 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN
2019

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019



Jalan Yos Sudarso No.133, Lontong Pancur, Pangkal Balam
Pangkalpinang Prop. Bangka Belitung 33115 Telp/Fax : (0717)
422213

Website : <https://bkp2pangkalpinang.karantina.pertanian.go.id>

Email : bkppangkalpinang@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pangkalpinang, 08 Juli 2019
Kepala Balai,

Drh. Saifuddin Zuhri
NIP. 196406211994031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Tanah

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

C.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.5. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

- D.5. Beban Pemeliharaan
- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
 - E.4.1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 - E.4.2. Penyesuaian Nilai Aset
 - E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.5. Transaksi Antar Entitas
 - E.5.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.6. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 08 Juli 2019
Kepala Balai,

Drh. Saifuddin Zuhri
NIP. 196406211994031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp643.807.290,00 atau mencapai 58,53% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.100.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp6.901.933.843,00 atau mencapai 56,92% dari alokasi anggaran sebesar Rp12.125.719.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2019.

Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp19.650.272.999,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp266.823.128,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp19.383.449.871,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 dan Rp19.550.272.999,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp647.255.673,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp4.170.192.849,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-3.522.937.176,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-1.005.811,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-3.523.942.987,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp16.792.046.683,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-3.523.942.987,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.282.169.303,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp19.550.272.999,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 30 JUNI 2019 dan 30 JUNI 2018**

Uraian	Catatan	30 Juni 2019			30 Juni 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	1.100.000.000,00	643.807.290,00	58,53	560.133.852,00
Jumlah Pendapatan		1.100.000.000,00	643.807.290,00	58,53	560.133.852,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	3.239.299.000,00	1.648.983.516,00	50,91	1.506.972.529,00
Belanja Barang	B.4.	3.976.176.000,00	1.896.350.327,00	47,69	1.340.377.941,00
Belanja Modal	B.5.	4.910.244.000,00	3.356.600.000,00	68,36	470.516.000,00
Jumlah Belanja		12.125.719.000,00	6.901.933.843,00	56,92	3.317.866.470,00

II. NERACA

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG
NERACA
PER 30 JUNI 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	30 Juni 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	100.000.000,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.2.	0,00	2.048.610,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	3.448.383,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.4.	-17.242,00	0,00
Persediaan	C.1.5.	163.391.987,00	218.998.064,00
Jumlah Aset Lancar		266.823.128,00	221.046.674,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	10.809.656.000,00	8.147.196.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	7.981.640.476,00	7.287.500.476,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	6.086.886.000,00	6.086.886.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	198.786.000,00	198.786.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	236.000.000,00	236.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6.	-5.294.287.089,00	-4.879.921.675,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.6.	-605.434.436,00	-463.562.657,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.6.	-29.797.080,00	-26.563.956,00
Jumlah Aset Tetap		19.383.449.871,00	16.586.320.188,00
Jumlah Aset		19.650.272.999,00	16.807.366.862,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	0,00	15.320.179,00
Uang Muka dari KPPN	C.4.2.	100.000.000,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		100.000.000,00	15.320.179,00
Jumlah Kewajiban		100.000.000,00	15.320.179,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	19.550.272.999,00	16.792.046.683,00
Jumlah Ekuitas		19.550.272.999,00	16.792.046.683,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		19.650.272.999,00	16.807.366.862,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 dan 30 JUNI 2018**

Uraian	Catatan	30 Juni 2019	30 Juni 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	647.255.673,00	559.572.452,00
JUMLAH PENDAPATAN		647.255.673,00	559.572.452,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	1.645.743.516,00	1.506.252.529,00
Beban Persediaan	D.3.	201.273.416,00	148.786.621,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	786.913.506,00	606.322.078,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	320.670.697,00	210.757.900,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	656.104.155,00	459.944.702,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	559.470.317,00	479.889.337,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	17.242,00	0,00
JUMLAH BEBAN		4.170.192.849,00	3.411.953.167,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-3.522.937.176,00	-2.852.380.715,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	131.900,00	1.443.469,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	1.137.711,00	1.648.894,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-1.005.811,00	-205.425,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-3.523.942.987,00	-2.852.586.140,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 dan 30 JUNI 2018**

Uraian	Catatan	30 Juni 2019	30 Juni 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	16.792.046.683,00	16.439.694.164,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-3.523.942.987,00	-2.852.586.140,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1.	0,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.2.	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3.	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5.	6.282.169.303,00	2.778.320.368,00
EKUITAS AKHIR		19.550.272.999,00	16.365.428.392,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang

• DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BUN Dan Kementerian Negara / Lembaga.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Comment [c1]: Tambahkan sesuai PER 42 2014

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan dan Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, Mendukung terwujudnya keamanan pangan dan Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik. Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang bertujuan untuk :

- a. Melaksanakan usaha pencegahan masuknya OPT/OPTK dan HPH/HPHK dari luar negeri ke wilayah Negara Republik Indonesia khususnya ke wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan sekitarnya;
- b. Melaksanakan implementasi kebijakan perkarantina nasional secara komprehensif,

- c. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan karantina pertanian kepada pengguna jasa secara cepat, tepat dan akurat di lingkup wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang,
- d. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal dalam memperlancar lalulintas perdagangan komoditi pertanian,
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan perkarantinaan.
- f. Mendukung Upaya khusus peningkatan ketahanan pangan

Melalui peranan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan perkarantinaandiharapkan Penyelenggaraan karantina pertanian yang pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan negara di bidang kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dapat terwujud atau mampu menghadapi serangan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang berkomitmen dengan visi "Menjadi Instansi Pelayanan yang terbaik di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019".

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Landasan Yuridis yang dimaksud adalah :
Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pada pasal 3 ayat (1) Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.
- 2) Lingkungan strategis
Perubahan lingkungan strategis seiring dengan globalisasi pengaruh dan hubungan antar bangsa memacu kompetisi kualitas SDM birokrasi yang profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dituntut untuk tidak diskriminatif serta harus mampu menciptakan birokrasi yang bersih dalam rangka terciptanya tata pemerintahan yang baik.
- 3) Arah Kebijakan Pembangunan Perkarantinaan
Penentuan Visi tersebut didasarkan pada landasan Rencana Strategis dan dan arah kebijakan pembangunan perkarantinaan Barantan, sebagaimana ditetapkan dalam rencana Strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2010

– 2019, Visi Badan Karantina Pertanian adalah “ Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya, dalam Perlindungan Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”

Profesional :

Meningkatkan pelayanan publik melalui sumber daya manusia atau pegawai-pegawai terpilih yang loyal serta profesional terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian.

Tangguh :

Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan negara di bidang kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.

Terpercaya :

Keberhasilan Barantan berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja baik di dalam maupun di luar negeri, oleh karena itu setiap kebijakan dan tindakan Barantan perlu mendapat kepercayaan yang tinggi.

Misi

Misi adalah pernyataan tentang hal yang akan dilakukan untuk mencapai Visi. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang mengemban misi sebagai berikut :

- Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan di wilayah propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan wilayah sekitarnya dari bahaya yang ditimbulkan oleh Pengganggu Tumbuhan Karantina.
- Memfasilitasi dan mendukung akses pasar komoditas pertanian di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekitarnya.
- Mendukung terwujudnya ketahanan dan keamanan pangan di wilayah propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan

Dalam tataran praktisnya, Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang membuat rencana strategis kegiatan yang diyakini mampu

mendorong terciptanya visi dan misi dalam rangka menunjang tujuan pembangunan pertanian. Kegiatan-kegiatan strategis tersebut meliputi :

- a) Penguatan kelembagaan
Program kerja Penguatan Kelembagaan pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah berupa output terlaksananya pembangunan Kantor-kantor Wilker beserta Instalasi Karantinanya serta secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana penunjang lainnya khususnya untuk penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dan berkompoten guna mendukung efektifitas pencegahan dan pengendalian OPT/OPTK dan HPH/HPHK.
- b) Penyediaan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah yang memadai .
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
 - a. Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan teknis dan penjenjangan bagi Pejabat Fungsional, Struktural dan Administrasi.
 - b. Melatih dan meningkatkan pengetahuan petugas karantina hewan dan tumbuhan melalui pelaksanaan workshop maupun pelatihan teknis.
 - c. Mengikuti pelatihan, seminar, rapat konsultasi dan workshop yang dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian, dan instansi lain.
 - d. Membekali buku saku tentang prosedur kerja 8P bagi para petugas POPT dan MV serta PMV dalam tugas perkarantinaan pertanian maupun dalam melakukan pengawasan lalu lintas hayati.
 - e. Melatih dan membekali pengetahuan kepada para petugas POPT dan MV serta PMV tentang teknik/tata cara pelaksanaan pengawasan lalu lintas hayati.
- c) Pengembangan Kerjasama dengan instansi terkait dan Public Awareness
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
 - a. Berpartisipasi aktif dalam berbagai forum pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi terkait, baik tingkat nasional maupun daerah,
 - b. Koordinasi dengan bea cukai, imigrasi, dan instansi terkait dengan system CIQ, dalam rangka pelaksanaan operasional,
 - c. Mengadakan sosialisasi perkarantinaan kepada masyarakat dan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Administrator Pelabuhan, perusahaan ekspor/impur dan instansi lainnya melalui kegiatan Bulan Bakti Karantina Pertanian.

- d. Koordinasi dengan Administrator Pelabuhan dan Administrator Bandar Udara, serta Kantor Pos dalam rangka kegiatan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran,
 - e. Koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam rangka penegakan hukum dibidang karantina pertanian,
 - f. Koordinasi dengan asosiasi perusahaan pengendali OPT dalam rangka pelaksanaan skim audit fumigasi dan asosiasi lainnya.
- d) Peningkatan penerapan Peraturan Perundangan dan Sistem Perkarantinaan, dengan mengacu pada landasan hukum yang berlaku (Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Menteri, Juklak/Juknis, dan Manual). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
- a. Meningkatkan kualitas pengawasan dan penindakan atas pelanggaran peraturan karantina pertanian,
 - b. Menghimpun dan mengumpulkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai peraturan perundang – undangan karantina pertanian,
 - c. Melakukan sosialisasi peraturan perundangan/regulasi karantina pertanian,
- e) Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi yang handal dan terintegrasi.
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
- a. Pengumpulan dan pengolahan data informasi publikasi dan dokumentasi,
 - b. Mengadakan bahan informasi dan publikasi, antara lain menerbitkan brosur, leaflet, film, dan buku tentang karantina pertanian.
 - c. Menerapkan jaringan informasi berbasis komputer,
 - d. Menerapkan program pengolahan dan pelaporan data kepegawaian, keuangan dan perlengkapan,
 - e. Pengadaan bahan komputer dan perlengkapan lainnya,
 - f. Pembuatan laporan bulanan dan tahunan yang tepat waktu.
- f) Pengembangan Infrastruktur. Sarana dan Prasarana yang optimal serta teknologi. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
- a. Melengkapi sarana, peralatan, dan bahan operasional/pemeriksaan media pembawa OPTK dan HPHK di lapangan,
 - b. Melengkapi peralatan dan bahan laboratorium sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. khususnya yang

berkaitan dengan identifikasi OPTK/HPHK, teknis dan metode pengujian yang tepat dan akurat.

- c. Melengkapi bahan dan peralatan perlakuan karantina pertanian,
 - d. Pemeliharaan gedung kantor dan instalansi karantina lainnya,
 - e. Pengadaan kendaraan operasional roda-2
 - f. Pemeliharaan sarana mobilitas berupa kendaraan operasional roda-4 dan roda-2,
 - g. Pengadaan dan pemeliharaan alat pengolahan data
 - h. Pengadaan dokumen operasional karantina yang tidak disediakan oleh Barantan.
- g) Meningkatkan efektifitas pengendalian internal. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Satker sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dengan unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(6) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	649.532.000,00	649.532.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	450.468.000,00	450.468.000,00
Jumlah Pendapatan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.651.011.000,00	2.651.011.000,00
Belanja Lembur	588.288.000,00	588.288.000,00
Belanja Barang Operasional	1.003.672.000,00	1.003.672.000,00
Belanja Barang Non Operasional	274.653.000,00	280.403.000,00
Belanja Barang Persediaan	199.563.000,00	199.563.000,00
Belanja Jasa	500.604.000,00	502.854.000,00
Belanja Pemeliharaan	569.854.000,00	569.854.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.427.830.000,00	1.419.830.000,00
Belanja Modal Tanah	3.700.000.000,00	2.662.460.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.019.250.000,00	1.168.790.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190.994.000,00	1.078.994.000,00
Jumlah Belanja	12.125.719.000,00	12.125.719.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp643.807.290,00 atau mencapai 58,53% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.100.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	209.286,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	450.468.000,00	209.782.000,00	46,57
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	649.532.000,00	433.816.004,00	66,79
Jumlah	1.100.000.000,00	643.807.290,00	58,53

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 14,94% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	209.286,00	488.405,00	-57,15
Pendapatan Jasa Lainnya	209.782.000,00	180.666.000,00	16,12
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	433.816.004,00	378.439.447,00	14,63
Pendapatan Lain-lain	0,00	540.000,00	- 100,00
Jumlah	643.807.290,00	560.133.852,00	14,94

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp6.901.933.843,00 atau 56,92% dari anggaran belanja sebesar Rp12.125.719.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
30 Juni 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	3.239.299.000,00	1.648.985.774,00	50,91

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Barang	3.976.176.000,00	1.896.350.327,00	47,69
Belanja Modal	4.910.244.000,00	3.356.600.000,00	68,36
Total Belanja Kotor	12.125.719.000,00	6.901.936.101,00	56,92
Pengembalian Belanja		-2.258,00	0,00
Total Belanja	12.125.719.000,00	6.901.933.843,00	56,92

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 108,02% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikkan Belanja Pegawai dikarenakan adanya penambahan 6 Pegawai Calon Aparatur Sipil Negara.
2. Kenaikkan Belanja Barang adanya kegiatan yang menunjang akselerasi ekspor guna mendukung proses ekspor komoditas pertanian dimata dunia, maksimalnya belanja operasional dan non operasional untuk meningkatkan kegiatan operasional perkantoran guna memberikan pelayanan secara efisien dan efektif.
3. Kenaikkan Belanja Modal adanya penambahan peralatan mesin berupa kendaraan roda 4, Meubelair, Alat Laboratorium dan Pengadaan Tanah guna mendukung sarana dan prasarana kantor balai.

Perbandingan Realisasi Belanja
30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	.%
Belanja Pegawai	1.648.983.516,00	1.506.972.529,00	9,42
Belanja Barang	1.896.350.327,00	1.340.377.941,00	41,48
Belanja Modal	3.356.600.000,00	470.516.000,00	613,39
Total Belanja	6.901.933.843,00	3.317.866.470,00	108,02

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.648.983.516,00 dan Rp1.506.972.529,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 9,42% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya perubahan tarif tunjangan fungsional veteriner 1 pegawai.
2. Adanya pegawai yang naik pangkat sebanyak 6 pegawai
3. Adanya pegawai yang kenaikan gaji berkala sebanyak 16 pegawai
4. Adanya penambahan tanggungan anggota keluarga baik yang menikah
Maupun menambah anak
5. Adanya penambahan pegawai kantor sebanyak 3 pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.422.920.774,00	1.341.052.805,00	6,10
Belanja Lembur	226.065.000,00	167.015.000,00	35,36
Jumlah Belanja Kotor	1.648.985.774,00	1.508.067.805,00	9,34
Pengembalian Belanja Pegawai	-2.258,00	-1.095.276,00	-99,79
Jumlah Belanja	1.648.983.516,00	1.506.972.529,00	9,42

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.896.350.327,00 dan Rp1.340.377.941,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 41,48% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Kegiatan Akselerasi Ekspor guna mendukung proses ekspor komoditas Pertanian
2. Untuk Belanja barang persediaan kantor dilakukan secara optimal agar pelayanan operasional dapat berjalan dengan lancar.

Perbandingan Belanja Barang
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	498.771.809,00	441.232.141,00	13,04

Belanja Barang Non Operasional	113.681.685,00	65.920.909,00	72,45
Belanja Barang Persediaan	122.630.400,00	54.991.500,00	123,00
Belanja Jasa	184.491.581,00	107.530.789,00	71,57
Belanja Pemeliharaan	320.670.697,00	210.757.900,00	52,15
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	656.104.155,00	459.944.702,00	42,65
Jumlah Belanja Kotor	1.896.350.327,00	1.340.377.941,00	41,48
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.896.350.327,00	1.340.377.941,00	41,48

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.356.600.000,00 dan Rp470.516.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 613,39% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pembelian kendaraan Roda 4 sebanyak 1 unit
2. Pembelian Meubelair 1 paket
3. Pembelian Alat Laboratorium Elis Reader 1 paket
4. Pembayaran Jasa Konsultansi penilaian harga tanah
5. Pengadaan Tanah kantor wilker Bandara Depati Amir 1 paket
6. Belanja Modal Honor panitia pengadaan Tanah

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah	2.662.460.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	694.140.000,00	332.516.000,00	108,75
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	138.000.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	3.356.600.000,00	470.516.000,00	613,39
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.356.600.000,00	470.516.000,00	613,39

B.5.1. BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.662.460.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Pengadaan Tanah pada kantor Balai diperuntukkan untuk kantor Wilker Bandara Depati Amir .

Perbandingan Belanja Modal Tanah
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	2.662.460.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	2.662.460.000,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	2.662.460.000,00	0,00	0,00

B.5.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp694.140.000,00 dan Rp332.516.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 108,75% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Untuk Mendukung sarana dan prasarana untuk meningkatkan layanan sertifikasi karantina pertanian
2. Serta Untuk menunjang kegiatan pemeriksaan Laboratorium yang handal

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	694.140.000,00	332.516.000,00	108,75
Jumlah Belanja Kotor	694.140.000,00	332.516.000,00	108,75
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	694.140.000,00	332.516.000,00	108,75

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 30 Juni 2019

Uraian	30 Juni 2019
UP	100.000.000,00
Jumlah	100.000.000,00

C.1.2. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.048.610,00.

Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
per 30 Juni 2019

Uraian	30 Juni 2019
Penjelasan 1	0,00
Penjelasan 2	0,00
dst...	0,00
Jumlah	0,00

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.448.383,00 dan Rp0,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
per 30 Juni 2019

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.448.383,00	0,00
Jumlah	3.448.383,00	0,00

C.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-17.242,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.5. Persediaan

Saldo Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp163.391.987,00 dan Rp218.998.064,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Barang Konsumsi	163.391.987,00	218.998.064,00
Jumlah	163.391.987,00	218.998.064,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.809.656.000,00 dan Rp8.147.196.000,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	8.147.196.000,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.662.460.000,00
Saldo per 30 Juni 2019	10.809.656.000,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa:

1. Penambahan dari Aset Tetap berupa Tanah senilai Rp.2.662.460.000,-

1	Belanja Jasa Penilaian Harga Tanah	sebanyak	1	Unit	senilai Rp.	74.360.000	,-
2	Pengadaan Tanah	sebanyak	1	Paket	senilai Rp.	2.560.800.000	,-
3	Honor Panitia Persiapan dan Pengadaan Tan	sebanyak	1	Unit	senilai Rp.	27.300.000	,-

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.981.640.476,00 dan Rp7.287.500.476,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	7.287.500.476,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	694.140.000,00
Saldo per 30 Juni 2019	7.981.640.476,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	-5.294.287.089,00
Nilai Buku per 30 Juni 2019	2.687.353.387,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Penambahan dari Pembelian Peralatan dan Mesin 3 Unit senilai Rp.694.140.000,- terdiri dari:

1	Mobil Inova Venturer	sebanyak	1	Unit	senilai Rp.	418.890.000	,-
2	Elisa Reader	sebanyak	1	Paket	senilai Rp.	190.000.000	,-
3	Meubelair	sebanyak	1	Unit	senilai Rp.	85.250.000	,-

2. Pengurangan terjadi dari Akumulasi penyusutan aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp.-5.294.287.089,-

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.086.886.000,00 dan Rp6.086.886.000,00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp198.786.000,00 dan Rp198.786.000,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp236.000.000,00 dan Rp236.000.000,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-5.929.518.605,00 dan Rp-5.370.048.288,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	7.981.640.476,00	-5.294.287.089,00	2.687.353.387,00
2.	Gedung dan Bangunan	6.086.886.000,00	-605.434.436,00	5.481.451.564,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	198.786.000,00	-29.797.080,00	168.988.920,00
4.	Aset Tetap Lainnya	236.000.000,00	0,00	236.000.000,00
Akumulasi Penyusutan		14.503.312.476,00	-5.929.518.605,00	8.573.793.871,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp15.320.179,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	3.240.000,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0,00	12.080.179,00
Jumlah	0,00	15.320.179,00

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp19.550.272.999,00 dan Rp16.792.046.683,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp647.255.673,00 dan Rp559.572.452,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	436.814.387,00	378.418.047,00	15,43
Pendapatan Jasa Lainnya	210.232.000,00	180.666.000,00	16,37
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	209.286,00	488.405,00	-57,15
Jumlah	647.255.673,00	559.572.452,00	15,67

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2019 dan 2018 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada Semester I TA 2019 mengalami peningkatan sebesar 15,67 persen dari realisasi pendapatan dari PNBP Semester I TA 2018

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.645.743.516,00 dan Rp1.506.252.529,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	970.984.340,00	904.247.000,00	7,38
Beban Pembulatan Gaji PNS	19.310,00	15.493,00	24,64
Beban Tunj. Anak PNS	23.033.826,00	22.154.466,00	3,97

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Beras PNS	57.284.220,00	56.487.600,00	1,41
Beban Tunj. Fungsional PNS	111.840.000,00	117.150.000,00	-4,53
Beban Tunj. PPh PNS	509.740,00	117.200,00	334,93
Beban Tunj. Struktural PNS	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	72.176.080,00	69.594.770,00	3,71
Beban Tunjangan Umum PNS	17.925.000,00	12.345.000,00	45,20
Beban Uang Lembur	226.065.000,00	167.015.000,00	35,36
Beban Uang Makan PNS	148.756.000,00	139.976.000,00	6,27
Jumlah	1.645.743.516,00	1.506.252.529,00	9,26

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 1.645.743.516,- dan Rp 1.506.252.529,-. Berdasarkan Tabel diatas, realisasi belanja TA 2019 mengalami peningkatan sebesar kenaikan 9,26 persen dari realisasi belanja TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh: Adanya penambahan Pegawai Calon Aparatur Sipil Negara sebanyak 6 Pegawai dan Adanya Penambahan Anggota Keluarga baru.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp201.273.416,00 dan Rp148.786.621,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	201.273.416,00	148.786.621,00	35,28
Jumlah	201.273.416,00	148.786.621,00	35,28

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Beban Persediaan tersebut merupakan barang barang yang habis pakai terutama yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran yang efektif dan efisien

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp786.913.506,00 dan Rp606.322.078,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Bahan	109.181.685,00	65.920.909,00	65,63
Beban Barang Operasional Lainnya	0,00	30.427.000,00	-100,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	84.850.000,00	74.830.000,00	13,39
Beban Honor Output Kegiatan	4.500.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Lainnya	46.527.704,00	2.115.000,00	2.099,89
Beban Jasa Profesi	0,00	7.200.000,00	-100,00
Beban Keperluan Perkantoran	354.825.469,00	264.658.419,00	34,07
Beban Langganan Air	4.656.500,00	6.244.550,00	-25,43
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.652.254,00	1.190.000,00	1.887,58
Beban Langganan Listrik	66.623.101,00	52.089.543,00	27,90
Beban Langganan Telepon	21.304.343,00	25.331.325,00	-15,90
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	54.906.740,00	64.277.500,00	-14,58
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.189.600,00	7.039.222,00	-40,48
Beban Sewa	11.696.110,00	4.998.610,00	133,99
Jumlah	786.913.506,00	606.322.078,00	29,78

Berdasarkan tabel diatas, Beban barang dan jasa merupakan penyelenggaraan kegiatan operasional untuk mendukung sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan kepada publik/pengguna jasa semaksimal dan seefisien sesuai dengan SOP.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp320.670.697,00 dan Rp210.757.900,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	183.163.000,00	90.475.000,00	102,45
Beban Pemeliharaan Jaringan	4.305.000,00	2.730.000,00	57,69
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	133.202.697,00	117.552.900,00	13,31
Jumlah	320.670.697,00	210.757.900,00	52,15

Berdasarkan tabel diatas, beban pemeliharaan merupakan beban yang dikeluarkan untuk memfasilitasi kegiatan operasional perkantoran sebagai langkah strategis untuk mencapai sumber daya manusia yang mampu dan handal dalam rencana kegiatan operasional kantor.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp656.104.155,00 dan Rp459.944.702,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	224.742.292,00	132.242.015,00	69,95
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.950.000,00	7.650.000,00	239,22
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.460.000,00	3.000.000,00	515,33
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	224.047.863,00	163.410.687,00	37,11
Beban Perjalanan Tetap	162.904.000,00	153.642.000,00	6,03
Jumlah	656.104.155,00	459.944.702,00	42,65

Berdasarkan tabel diatas, Beban perjalanan dinas merupakan beban yg diperuntukan untuk pegawai mengelola anggaran yg diberikan untuk membina pegawai dalam melakukan perjalanan dinas.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp559.470.317,00 dan Rp479.889.337,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	141.871.779,00	141.871.779,00	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	462.500,00	462.500,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	2.770.624,00	2.253.957,00	22,92
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	414.365.414,00	335.301.101,00	23,58
Jumlah	559.470.317,00	479.889.337,00	16,58

Berdasarkan Tabel Diatas, Beban Penyusutan dan Amortisasi atas nilai suatu Aset tetap yang disusutkan antara periode Juni 2019 dan Juni 2018 mengalami kenaikan sebesar 16,58 dibandingkan dengan realisasi Juni 2018.

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp17.242,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNPB	17.242,00	0,00	0,00

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Jumlah	17.242,00	0,00	0,00

Berdasarkan Tabel di Atas, Perbandingan realisasi antara Juni 2019 dan Juni 2018 adalah 17.242,- dan 0,- merupakan beban penyisihan piutang tak tertagih yaitu Piutang Bukan pajak.

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-1.137.711,00	-15.962,00	7.027,62
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	0,00	-1.632.932,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	131.900,00	903.469,00	-85,40
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	540.000,00	-100,00
Jumlah	-1.005.811,00	-205.425,00	389,62

Berdasarkan Tabel di Atas, Realisasi 30 Juni 2019 dan Juni 2018 adalah Rp.-1.005.811,- dan Rp.-205.425,- mengalami kenaikan sebesar 389,62% yang tersaji Beban Penyesuaian Nilai Persediaan Rp.-1.137.711,- dan terdapat pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan Rp.131.900.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp16.792.046.683,00 dan Rp16.439.694.164,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp-3.523.942.987,00 dan Rp-2.852.586.140,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4.1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4.2. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.282.169.303,00 dan Rp2.778.320.368,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 30 Juni 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.901.933.843,00
Diterima dari Entitas Lain	-643.807.290,00
Transfer Keluar	-465.250,00
Transfer Masuk	24.508.000,00
Jumlah	6.282.169.303,00

E.5.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 30 Juni 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-643.807.290,00 sedangkan DKEL sebesar Rp6.901.933.843,00.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp24.508.000,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 30 Juni 2019.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018120199412110000KP	24.508.000,00
Jumlah			24.508.000,00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp-465.250,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar per 30 Juni 2019.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018121100237788000KD	-465.250,00
Jumlah			-465.250,00

E.6. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp19.550.272.999,00 dan Rp16.365.428.392,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

- a. Di akhir tahun 2018 sewa tanah dari PELINDO Cabang Pangkalpinang pada Balai karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang terdapat Belanja dibayar di muka untuk periode per tanggal 1 januari sd 31 desember 2019 sebesar Rp.2.048.610,-
- b. Di awal tahun 2019 Bulan Februari terdapat kelebihan setor senilai Rp.829.650,- seharusnya disetor Rp.142.950,- dan dilakukan konsultasi ke KPPN sesuai dengan surat permohonan Nomor 273/KU.440/K.30.C/02/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang permohonan pengembalian PNBP dan Pengembalian penerimaan lainnya dan SK No. 274/KU.440/K.30.C/02/2019 tanggal 13 Februari 2019 dan diterbitkan SPMP-PNBP Nomor 8001 tanggal 28 Februari 2018 senilai Rp.686.700,- pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang.
- c. Diakhir Bulan Juni terdapat Piutang Bukan Pajak senilai Rp.3.448.383,- dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak senilai Rp.-17.242,- selisih antara Tanggal Buku dan Tanggal Bayar setoran PNBP yang seharusnya diakui Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang tetapi belum diakui oleh aplikasi OMSPAN DJPB.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

- a. Tanah seluas 3,406 m2 yang terletak di Jalan Jl Manggar Desa Buluh Tumbang Kec.Tanjung Pandan Kab. Belitung yang merupakan Tanah ex wilker Karantina Hewan Palembang sedang dalam sengketa karena adanya kepemilikan ganda dengan pihak TNI AU Pangkalan Tanjung Pandan, dalam proses penyelesaiannya sudah di lakukan pertemuan dengan pihak –pihak terkait seperti penyedian barang, kepala desa, pihak AU sendiri, BPN baik dengan BKP Kelas II Pangkalpinang maupun dengan Tim dari Badan Karantina Pertanian, yang terakhir pertemuan dengan Irjen dengan pihak TNI AU juga belum ada hasilnya juga masih menunggu kebijakan dari pihak kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan. Dan terakhir Proses penyelesaian sudah ada titik temu dengan Pihak AURI sehingga dari pihak BPN Tanjung pandan sudah menerbitkan sertifikat Tanah no. 00033 pada tanggal 01 Maret 2018 dan sertifikat tanah tersebut sudah di serah terima dengan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang.
- b. Pada bulan JUNI Tahun 2019 Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang telah melakukan revisi DIPA sebanyak 1 kali hal ini dikarenakan dikarenakan adanya

jumlah Out yang ada dalam DIPA tidak sesuai dengan output pada detail kegiatan dan pengeseran mata anggaran yang tidak mengurangi pagu pada Belanja Barang.

c. Ditahun 2019 Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang melakukan Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Wilker Bandara Depati Amir dan Pengadaan Kendaraan Roda 4, serta Meubelair sehingga menambah Aset Kantor Balai.

e. Pada Tahun 2017 terjadi penggantian petugas SIMAK BMN sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Juli 2016 adanya pegawai yang bertanggungjawab SIMAK BMN atas nama Risky Welim pindah tugas maka diganti dengan pegawai Baru atas nama Beni Erico G sampai dengan semester II Tahun 2017 setelah itu karena dapat Mutasi pindah ke Medan, Jadi Beban kerja pegawai tersebut diganti oleh petugas baru atas nama Ali Azhar.

f. Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Drh. Saifuddin Zuhri
Pejabat Pembuat Komitmen	: Mohammad Hazairin, SP
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Eta Budi Santoso, SP
Bendahara	: Agus Giarto, SP